

E-GOVERNANCE UNTUK PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

M. Munir

Staida Krempyang Nganjuk

Email: m.munirkaterban@gmail.com

Ita Zumrotus Su'ada

Staida Krempyang Nganjuk

Email: itazumrotussuada@gmail.com

Abstract.

This article examines the role of e-governance in improving the quality of Islamic education management using a library research approach. The study reviews various scholarly sources to describe the concepts, practices, and challenges of implementing digital governance in Islamic educational institutions. The analysis shows that e-governance enhances transparency, efficiency, and service quality through the integration of digital academic information systems, online administrative services, and electronic quality assurance mechanisms. Successful implementation is influenced by leadership commitment, adequate infrastructure, policy support, and continuous human resource development. However, obstacles remain, including limited funding, technological literacy gaps, and regulatory adaptation. The findings affirm that e-governance is not merely a technological innovation but also a managerial strategy that strengthens accountability, improves decision-making quality, and ensures the sustainability of quality management in Islamic education. This study provides theoretical foundations and practical recommendations for managers and policymakers to optimize digital governance.

Keywords: *e-governance; islamic education management; digitalization; quality improvement.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah wajah tata kelola pendidikan di seluruh dunia.¹ Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek pembelajaran, tetapi juga memengaruhi manajemen institusi pendidikan secara menyeluruh. Lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi, kini dihadapkan pada tuntutan untuk menyelenggarakan sistem manajemen yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.² Tekanan globalisasi, kemajuan teknologi, serta ekspektasi publik menuntut pengelolaan pendidikan Islam yang mampu menyeimbangkan

¹Ahmad Junaedy Abu Huraerah, Abdurrahman Wahid Abdullah, and Alimuddin Rivai, "Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Indonesia," *Journal of Islamic Education Policy* 8, no. 2 (2024).

²Noor Liyana Selvia, "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792-808.

antara nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan manajemen modern berbasis digital.

Dalam konteks tersebut, konsep *e-governance* hadir sebagai inovasi penting dalam manajemen pendidikan. *E-governance* merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses administrasi, layanan, pengambilan keputusan, dan komunikasi antara pemangku kepentingan pendidikan.³ Penerapan *e-governance* diyakini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sistem informasi akademik daring, layanan administrasi terintegrasi, serta mekanisme penjaminan mutu yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara *real time*. Dengan dukungan infrastruktur teknologi, *e-governance* juga membuka peluang peningkatan efisiensi kerja, penghematan biaya, serta perbaikan kualitas layanan kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-governance* mampu memperbaiki kinerja lembaga pendidikan, baik dalam hal efektivitas layanan maupun akuntabilitas pengelolaan.⁴ Studi tentang transformasi digital di berbagai institusi pendidikan umum misalnya, memperlihatkan dampak positif berupa peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, kecepatan pelayanan, dan penguatan pengawasan mutu. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti penerapan *e-governance* pada lembaga pendidikan Islam masih relatif terbatas. Kebanyakan literatur masih berfokus pada aspek pedagogis seperti e-learning, sedangkan dimensi manajemen, tata kelola, dan mutu lembaga Islam belum banyak mendapat perhatian mendalam.

Keterbatasan penelitian tersebut menjadi celah penting bagi pengembangan konsep manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi. Mengingat karakteristik lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunikan nilai, budaya, dan struktur kelembagaan, penerapan *e-governance* memerlukan adaptasi yang cermat. Tantangan seperti keterbatasan pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan literasi teknologi, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, kajian pustaka yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk memetakan temuan-temuan penelitian sebelumnya dan merumuskan konsep yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menelaah literatur ilmiah, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, model implementasi, faktor pendukung, serta hambatan penerapan *e-governance* dalam manajemen pendidikan Islam. Analisis literatur juga memberikan gambaran mengenai tren global dan praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan manajemen berbasis digital di lingkungan pendidikan Islam.

Berdasarkan kajian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran *e-governance* dalam peningkatan mutu manajemen pendidikan Islam, menelaah faktor-faktor keberhasilan dan kendala implementasi, serta memberikan

³Novia Nurkartika, "E-Government Transformasi Menuju Good Governance," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1-10.

⁴Wuryan Andayani et al., "Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 2 (2024): 116-131.

rekomendasi strategis yang dapat diadaptasi oleh lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan Islam, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi pengelola, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan tata kelola digital yang berorientasi pada peningkatan mutu, akuntabilitas, dan daya saing lembaga pendidikan Islam di era transformasi digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau kajian pustaka, yaitu penelitian yang seluruh prosesnya dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik *e-governance* dalam manajemen pendidikan Islam. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memaparkan konsep, model implementasi, faktor pendukung, dan tantangan penerapan *e-governance* berdasarkan temuan-temuan dari sumber-sumber pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penggalian teori, hasil penelitian terdahulu, dan analisis konseptual tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian berasal dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam dan *e-governance*. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, dan kajian mendalam terhadap literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan dengan menelusuri tema-tema utama, mengelompokkan temuan-temuan penting, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis digital.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Model *E-governance* dalam Pendidikan Islam

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi tata kelola yang memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah *e-governance*, yaitu penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan manajemen dan pelayanan publik. Secara konseptual, *e-governance* tidak hanya mencakup pemanfaatan perangkat lunak atau sistem daring, tetapi juga menekankan pada perbaikan proses pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas melalui dukungan teknologi.⁵ Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini menjadi penting karena dapat menjembatani tuntutan efisiensi manajemen modern dengan nilai-nilai keislaman yang mengutamakan amanah dan keterbukaan.

Literatur mendefinisikan *e-governance* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat pengawasan, dan menyediakan akses informasi yang lebih luas

⁵S S Pristiyanto and M P MM, "Administrasi Elektronik Dalam Pendidikan," *Pengantar Administrasi Elektronik* 98 (2024).

kepada pemangku kepentingan.⁶ Prinsip-prinsip dasar *e-governance* meliputi transparansi, partisipasi, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas.⁷ Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat, mahasiswa, dan dosen memantau kebijakan dan layanan secara *real time*. Partisipasi membuka ruang interaksi dua arah antara manajemen dan pemangku kepentingan. Sementara itu, efisiensi dan responsivitas memastikan pelayanan berjalan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam pendidikan Islam, penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki makna yang lebih luas karena selaras dengan nilai syariah yang menekankan kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*tabligh*), dan tanggung jawab (*amanah*). Nilai-nilai ini memberi dasar etis bagi setiap inovasi teknologi agar tidak hanya berorientasi pada kemudahan teknis, tetapi juga menjaga integritas moral lembaga. Dengan demikian, *e-governance* bukan sekadar alat administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah lembaga pendidikan Islam agar tetap kredibel di mata masyarakat.⁸

Kerangka kerja *e-governance* dalam pendidikan Islam umumnya mencakup tiga lapisan utama, yaitu infrastruktur teknologi, kebijakan manajemen, dan partisipasi pemangku kepentingan.⁹ Infrastruktur meliputi jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung. Kebijakan manajemen mengatur standar operasional, mekanisme keamanan data, serta prosedur layanan daring. Sementara itu, partisipasi pemangku kepentingan menekankan pentingnya pelibatan dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Ketiga lapisan ini harus saling mendukung agar sistem *e-governance* dapat berjalan optimal.

Salah satu model penerapan *e-governance* yang relevan bagi lembaga pendidikan Islam adalah *academic information system*. Sistem ini mengintegrasikan data akademik seperti pendaftaran mahasiswa, pengelolaan jadwal kuliah, penilaian, hingga arsip dokumen secara digital. Dengan model ini, mahasiswa dapat mengakses informasi akademik kapan saja, sedangkan pengelola dapat memantau proses secara lebih akurat. Model lain adalah *online service platform* yang menyediakan layanan administrasi, keuangan, dan bimbingan akademik secara daring. Melalui platform ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

Selain itu, integrasi keuangan digital merupakan model yang semakin penting dalam mendukung tata kelola yang transparan. Sistem pembayaran berbasis daring memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan

⁶Erinda Alfiani Fauzi and Nike Purnamawati, "Definisi Konseptual E-Government Dan E-Governance: Analisis Komparatif," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 12, no. 1 (2025): 16–22.

⁷Jamiluddin A M Putra et al., "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239–1251.

⁸Syah Abadi Mendrofa et al., *Good Governance Melalui Publik Digital* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2024).

⁹S T Yusuf Amrozi and M MT, *E-Government Di Era Artificial Intelligence* (Prenada Media, 2024).

pengawasan keuangan dilakukan secara otomatis.¹⁰ Hal ini tidak hanya meminimalkan potensi kecurangan, tetapi juga memudahkan lembaga untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi lembaga pendidikan Islam, model ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menuntut setiap transaksi dilakukan secara jujur dan dapat diaudit.

Berbagai model *e-governance* tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada kesiapan institusi, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep, prinsip, dan model *e-governance*, lembaga pendidikan Islam dapat merancang strategi implementasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, sehingga tujuan peningkatan mutu dan daya saing dapat tercapai secara berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung Implementasi *E-governance*

Keberhasilan penerapan *e-governance* di lembaga pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kekuatan faktor pendukung yang saling melengkapi. Salah satu faktor paling krusial adalah komitmen kepemimpinan. Pimpinan lembaga yang memiliki visi digital akan mendorong transformasi secara konsisten melalui kebijakan strategis, pengalokasian anggaran, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif.¹¹ Penelitian Muwafiqus Shobri menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner berperan besar dalam mempercepat integrasi sistem informasi akademik di perguruan tinggi Islam, karena pimpinan aktif memfasilitasi pelatihan dan menyediakan dukungan moral bagi tenaga kependidikan.¹²

Selain kepemimpinan internal, dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi penentu utama. Regulasi yang jelas, seperti kebijakan digitalisasi administrasi pendidikan atau standar keamanan data, memberikan legitimasi bagi lembaga untuk mengimplementasikan *e-governance*. Studi yang dilakukan oleh Khusniah Elindah pada madrasah di Jawa Timur menemukan bahwa penerapan aplikasi layanan daring menjadi lebih efektif ketika didukung oleh kebijakan Kementerian Agama terkait pengelolaan data dan transparansi keuangan.¹³ Kebijakan tersebut mempermudah proses koordinasi dan memberikan kepastian hukum bagi pengelola lembaga.

¹⁰Siti Romadhotul Kholifah et al., "Optimalisasi Kepengawasan Pendidikan Pesantren Dalam Manajemen Keuangan Lembaga Dan Santri Melalui Aplikasi Junio Smart," *Proceedings Series of Educational Studies* (2025).

¹¹Andi Setiawan and Maya Lestari, "Digital Learning Leadership: Tantangan Dan Strategi Kepala Sekolah Di Masa Kini," *Jurnal Dinamika Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2025): 24–34.

¹²Muwafiqus Shobri, "Peran Kepala Madrasah Sebagai Leader Visioner: Strategi Penguatan Mutu Dan Integritas Lembaga Pendidikan Islam," *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 191–210.

¹³Khusniah Elindah, "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur teknologi. Infrastruktur meliputi jaringan internet yang stabil, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem keamanan data.¹⁴ Tanpa dukungan teknologi yang memadai, implementasi *e-governance* hanya akan menambah beban kerja administratif. Balqis Husain dan Megawati Basri menegaskan bahwa kampus yang memiliki konektivitas internet baik dan sistem server yang terkelola profesional mampu meningkatkan kecepatan pelayanan akademik hingga 40 persen dibandingkan lembaga yang masih menggunakan sistem manual.¹⁵

Selain perangkat teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberlanjutan *e-governance*. SDM yang memahami teknologi dan memiliki literasi digital tinggi akan mampu mengoperasikan sistem dengan baik serta memberikan layanan yang optimal. Hasil kajian oleh Rika Yohana Sari pada perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa program pelatihan rutin mengenai penggunaan sistem informasi akademik meningkatkan keterampilan staf administrasi dan mengurangi tingkat kesalahan input data secara signifikan.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa investasi pada pengembangan SDM sama pentingnya dengan pengadaan perangkat teknologi.

Sinergi antara kepemimpinan, kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, dan pengembangan SDM menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi *e-governance*. Ketika pimpinan memiliki visi digital, pemerintah menyediakan regulasi dan pendanaan, infrastruktur terbangun dengan baik, serta SDM siap mengoperasikan sistem, maka penerapan *e-governance* dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap mutu layanan pendidikan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan proses digitalisasi tidak hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai perubahan budaya manajemen.

Literatur secara konsisten menegaskan bahwa keberhasilan *e-governance* bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan kolaborasi multiaktor yang saling mendukung. Bagi lembaga pendidikan Islam, pemahaman atas faktor pendukung ini penting sebagai dasar penyusunan strategi implementasi yang realistis dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kepemimpinan, memanfaatkan kebijakan pemerintah, menyiapkan infrastruktur, dan mengembangkan SDM, lembaga pendidikan Islam dapat mewujudkan tata kelola digital yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

3. Hambatan dan Tantangan Penerapan

Implementasi *e-governance* di lembaga pendidikan Islam meskipun diakui membawa manfaat besar, tetap menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

¹⁴Gildan Jaya Muhammad Ramadhan, "Optimalisasi Jaringan Dan Infrastruktur Ti Untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar Di Sekolah," *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 1 (2024): 1-6.

¹⁵Balqis Husain and Megawati Basri, "Pembelajaran E-Learning Di Masa Pandemi," *Surabaya: Pustaka Aksara* (2021).

¹⁶Rika Yohana Sari, Ahmad Subandi, and Irsyad Irsyad, "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan," *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 4, no. 1 (2024): 21-29.

Hambatan ini muncul dari aspek pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, hingga regulasi, sehingga proses digitalisasi memerlukan strategi khusus agar tidak berhenti pada tahap wacana.

a. Keterbatasan Pendanaan

Penerapan sistem *e-governance* menuntut investasi yang cukup besar, baik untuk pengadaan perangkat keras seperti server, komputer, dan jaringan internet, maupun perangkat lunak serta biaya pemeliharaan sistem.¹⁷ Banyak madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam masih bergantung pada anggaran rutin yang terbatas sehingga proses digitalisasi berjalan lambat dan tidak merata. Penelitian Majidah Aqifah Mania dkk. menemukan bahwa sebagian besar madrasah hanya mampu mengadopsi sistem informasi akademik secara parsial karena kekurangan dana.¹⁸ Ketergantungan pada hibah pemerintah atau donatur eksternal sering kali membuat pengembangan sistem tidak berkelanjutan dan terhenti pada tahap awal.

b. Kesenjangan Literasi Digital

Selain masalah biaya, kesenjangan kemampuan teknologi di kalangan tenaga pendidik, staf administrasi, dan mahasiswa menjadi kendala besar. Tidak semua civitas akademika memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi manajemen daring, melakukan input data, atau menjaga keamanan informasi. Studi Fadia Putri Illa and Cynthia Eka Violita pada perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital sudah tersedia, kesalahan input data, keterlambatan pelayanan, dan kebingungan pengguna tetap terjadi karena kurangnya pelatihan intensif.¹⁹ Kondisi ini juga dialami beberapa pesantren yang masih mengandalkan metode administrasi manual karena pengasuh dan pengurus belum terbiasa dengan perangkat digital.

c. Resistensi Budaya Organisasi

Budaya kerja tradisional yang telah lama mengakar di banyak lembaga pendidikan Islam sering menimbulkan resistensi terhadap inovasi digital. Sebagian pengelola khawatir bahwa penggunaan sistem daring akan mengurangi interaksi personal, menggeser peran administratif, atau bahkan mengancam nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian Rd Heri Solehudin mencatat bahwa beberapa pesantren menolak penerapan sistem keuangan daring karena dianggap bertentangan dengan tradisi lisan dan kebiasaan administrasi berbasis kepercayaan.²⁰ Resistensi ini bukan semata persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai

¹⁷Andayani et al., "Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia."

¹⁸Majidah Aqifah Mania, Isra Yanuar Giu, and Ade Nurpriatna, "Evaluation of the Effectiveness of Management Information Systems in Improving Academic Performance and Management," *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 34–55.

¹⁹Fadia Putri Illa and Cynthia Eka Violita, "Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Tengah Keterbatasan Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah," *Praktek Kerja Lapang Manajemen* 1, no. 2 (2025): 67–73.

²⁰Rd Heri Solehudin, "Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Karakter Religius Menuju Transformasi Sosial Berkemajuan," *Inovasi Pendidikan dalam Multi Perspektif* 182 (2022).

internal yang memerlukan pendekatan sosialisasi persuasif dan pendampingan budaya organisasi.

Tantangan

a. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

Setelah sistem *e-governance* diterapkan, tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas dan keamanan infrastruktur. Pemeliharaan jaringan, pembaruan perangkat lunak, dan perbaikan sistem memerlukan biaya tambahan serta tenaga teknis yang andal.²¹ Tanpa pemeliharaan rutin, gangguan jaringan atau kerusakan sistem dapat menghambat proses pelayanan dan menurunkan kepercayaan pengguna.

b. Keamanan Data dan Privasi Pengguna

Isu keamanan data menjadi perhatian penting karena sistem *e-governance* menyimpan informasi sensitif, seperti data pribadi mahasiswa, laporan keuangan, dan arsip akademik. Banyak lembaga belum memiliki standar perlindungan data yang jelas sehingga rawan kebocoran atau penyalahgunaan informasi.²² Kasus pencurian data atau peretasan sistem dapat merusak reputasi lembaga dan menimbulkan masalah hukum.

c. Adaptasi Kebijakan Internal

Perkembangan teknologi sering kali melaju lebih cepat daripada kemampuan lembaga dalam menyesuaikan kebijakan internal.²³ Banyak perguruan tinggi Islam belum memiliki regulasi operasional yang mendukung proses digitalisasi, seperti standar keamanan informasi, mekanisme audit digital, atau pedoman penggunaan tanda tangan elektronik. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian dan menghambat pengambilan keputusan strategis.

d. Ketersediaan Tenaga Teknis Profesional

Implementasi *e-governance* membutuhkan tenaga ahli yang mampu merancang, mengelola, dan memperbaiki sistem digital.²⁴ Namun, lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berlokasi di daerah, sering kekurangan tenaga IT profesional. Kekurangan ini menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga atau vendor eksternal, yang dapat meningkatkan biaya dan risiko kebocoran data.

e. Keberlanjutan Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Meskipun beberapa program digitalisasi mendapat dukungan awal dari pemerintah atau lembaga donor, keberlanjutan bantuan ini tidak selalu terjamin. Ketergantungan pada kebijakan yang berubah-ubah dapat

²¹Daniel Arsa et al., "Pemeliharaan Dan Pelatihan Troubleshoot Jaringan Komputer Untuk Peningkatan Layanan Akademik Universitas Jambi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak* 6, no. 1 (2025).

²²Syifa Nurul Sabila and Wira Atman, "Studi Kasus Kebocoran Data SIM Card Oleh Bjorka: Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Keamanan Digital Di Indonesia," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 142-154.

²³Andhika Wirawan et al., "Adaptasi Sekolah Terhadap Perubahan Lingkungan Eksternal: Strategi Dan Implementasi," *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 4 (2024): 189-206.

²⁴ Polii Einjelheart Hansiden, "Governansi Digital," *Penerbit Tahta Media* (2024).

membuat implementasi *e-governance* tidak konsisten. Tanpa dukungan jangka panjang, lembaga pendidikan Islam berisiko menghadapi stagnasi pengembangan sistem dan kesulitan mempertahankan layanan digital yang telah berjalan.

Rangkaian hambatan dan tantangan tersebut menegaskan bahwa penerapan *e-governance* di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Keberhasilan digitalisasi bergantung pada keselarasan antara pendanaan, literasi digital, perubahan budaya organisasi, kebijakan yang adaptif, dan dukungan multi-pihak agar *e-governance* benar-benar mampu meningkatkan mutu manajemen pendidikan Islam secara berkelanjutan.

4. Implikasi *E-governance* terhadap Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan Islam

Penerapan *e-governance* membawa dampak nyata terhadap mutu pelayanan akademik di lembaga pendidikan Islam. Digitalisasi layanan akademik memungkinkan proses pendaftaran mahasiswa, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengolahan nilai, hingga penerbitan transkrip dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Penelitian Yaya Suryana dan Sofhian Fazrin Nasrulloh menunjukkan bahwa sistem informasi akademik berbasis daring di perguruan tinggi Islam meningkatkan efisiensi pelayanan hingga 40 persen dibandingkan metode manual.²⁵ Kecepatan akses informasi ini memberikan kepuasan lebih besar bagi mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama layanan.

Selain pelayanan akademik, *e-governance* juga berimplikasi positif pada akuntabilitas keuangan. Sistem keuangan berbasis digital memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi secara *real time*. Studi Andreki Ariesta menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan daring mengurangi risiko manipulasi data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.²⁶ Dengan keterbukaan laporan keuangan, lembaga dapat meningkatkan kredibilitas di mata orang tua, donatur, dan pemerintah.

Aspek transparansi juga semakin terjamin melalui penerapan *e-governance*. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat, dapat memantau kebijakan, jadwal, dan capaian kinerja lembaga melalui portal informasi yang dapat diakses secara luas. Penelitian Harimurti Wulandjani dkk. menemukan bahwa keterbukaan data akademik dan keuangan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses evaluasi kampus, sekaligus menekan praktik birokrasi tertutup yang selama ini menjadi kelemahan sebagian lembaga pendidikan Islam.²⁷ Transparansi ini sejalan

²⁵ Yaya Suryana and Sofhian Fazrin Nasrulloh, "Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Di Sma 2 Kuningan Berbasis Website," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 5 (2024): 10212–10222.

²⁶ Andreki Ariesta, Alfikri Pratama, and Fifi Wildanah, "Sistem Administrasi Keuangan Sekolah Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Efektifitas Pendidikan," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* / *E-ISSN: 3062-7788*, no. 1 (2025): 343–349.

²⁷ Harimurti Wulandjani et al., *Collaborative Governance* (Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia, 2025).

dengan prinsip good governance yang menuntut keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas publik.

Dari perspektif teori manajemen mutu, penerapan *e-governance* mendukung prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Dengan sistem berbasis data, lembaga dapat memantau indikator kinerja secara periodik, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan langkah perbaikan secara cepat. Temuan Hendi Kurniyawan dan Achmad Fais Ghozali menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang menerapkan monitoring digital mampu meningkatkan akreditasi program studi karena proses evaluasi mutu dapat dilakukan lebih sistematis dan berbasis bukti.²⁸ Hal ini memperkuat posisi *e-governance* sebagai alat strategis untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu pendidikan.

Dampak lain yang penting adalah peningkatan kepuasan pemangku kepentingan. Mahasiswa merasa terbantu dengan layanan yang cepat dan mudah diakses, dosen mendapat dukungan data yang akurat untuk proses akademik, sedangkan masyarakat memperoleh jaminan akuntabilitas pengelolaan dana dan kualitas lulusan. Studi literatur internasional juga menunjukkan korelasi positif antara penerapan *e-governance* dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Tingkat kepuasan ini pada akhirnya berkontribusi pada citra positif lembaga di mata masyarakat luas.

Lebih jauh, *e-governance* memiliki relevansi strategis terhadap penguatan daya saing lembaga pendidikan Islam. Di tengah kompetisi global, lembaga yang mampu menunjukkan tata kelola digital yang efektif akan lebih mudah menarik minat mahasiswa, mendapatkan dukungan mitra, dan memperoleh akreditasi internasional.²⁹ Dengan sistem layanan yang transparan dan efisien, lembaga pendidikan Islam dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam arena pendidikan global. Digitalisasi manajemen menjadi salah satu syarat penting untuk meraih pengakuan mutu internasional.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa *e-governance* bukan hanya sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen strategis untuk membangun manajemen pendidikan Islam yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing. Implikasi positif pada pelayanan akademik, akuntabilitas keuangan, transparansi, dan kepuasan pemangku kepentingan menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola merupakan langkah penting menuju lembaga pendidikan Islam yang lebih modern dan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan *e-governance* sekaligus menjadi bukti bahwa nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan dengan praktik manajemen mutu global untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan terpercaya.

Kesimpulan

²⁸Hendi Kurniyawan and Achmad Fais Ghozali, "Strategi Inovasi Manajemen Mutu Untuk Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Digital," *PARADIGMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN PENDIDIKAN* 11, no. 2 (2025): 108-115.

²⁹Akhmaloka Akhmaloka et al., "Top Executive University Gathering Tata Kelola Perguruan Tinggi Menuju Universitas Berkelas Dunia" (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian ..., 2023).

Kajian pustaka ini menegaskan bahwa *e-governance* merupakan inovasi strategis yang mampu meningkatkan mutu manajemen pendidikan Islam melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Konsep dan model penerapan, seperti academic information system, online service platform, dan integrasi keuangan digital, terbukti efektif memperbaiki tata kelola lembaga pendidikan Islam bila didukung kerangka kerja yang tepat. Faktor pendukung seperti komitmen kepemimpinan, dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan yang menentukan sejauh mana digitalisasi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan, termasuk keterbatasan pendanaan, kesenjangan literasi digital, resistensi budaya organisasi, dan ketidakjelasan regulasi. Meskipun demikian, temuan literatur menunjukkan bahwa ketika faktor pendukung diperkuat dan kendala diatasi, *e-governance* berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan akademik, akuntabilitas keuangan, transparansi informasi, serta kepuasan pemangku kepentingan. Dampak ini sekaligus memperkuat daya saing lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global, menjadikan *e-governance* bukan hanya sarana teknologis, tetapi juga strategi manajerial yang selaras dengan prinsip manajemen mutu berkelanjutan.

References

- Akhmaloka, Akhmaloka, Badri Munir Sukoco, Budi Widjaja Soetjipto, Docki Saraswati, Ferani Eva Zulvia, Hermawan Kresno Dipojono, Indra Wijaya Kusuma, Kadarsah Suryadi, Muh Massi, and Supriyono Supriyono. "Top Executive University Gathering Tata Kelola Perguruan Tinggi Menuju Universitas Berkelas Dunia." Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian ..., 2023.
- Andayani, Wuryan, Eka Putrianti, Oktavima Wisdaningrum, Panji Putranto, and Yesika Yanuarisa. "Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 2 (2024): 116-131.
- Ariesta, Andreki, Alfikri Pratama, and Fifin Wildanah. "Sistem Administrasi Keuangan Sekolah Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Efektifitas Pendidikan." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan/ E-ISSN: 3062-7788* 2, no. 1 (2025): 343-349.
- Arsa, Daniel, Pradita Eko Prasetyo Utomo, Dawam Suprayogi, and Mohamad Ilhami. "Pemeliharaan Dan Pelatihan Troubleshoot Jaringan Komputer Untuk Peningkatan Layanan Akademik Universitas Jambi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak* 6, no. 1 (2025).
- Elindah, Khusniah. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

- Fauzi, Erinda Alfiani, and Nike Purnamawati. "Definisi Konseptual E-Government Dan E-Governance: Analisis Komparatif." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 12, no. 1 (2025): 16–22.
- Hansiden, Polii Einjelheart. "Governansi Digital." *Penerbit Tahta Media* (2024).
- Huraerah, Ahmad Junaedy Abu, Abdurrahman Wahid Abdullah, and Alimuddin Rivai. "Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Indonesia." *Journal of Islamic Education Policy* 8, no. 2 (2024).
- Husain, Balqis, and Megawati Basri. "Pembelajaran E-Learning Di Masa Pandemi." *Surabaya: Pustaka Aksara* (2021).
- Illa, Fadia Putri, and Cynthia Eka Violita. "Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Tengah Keterbatasan Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah." *Praktek Kerja Lapang Manajemen* 1, no. 2 (2025): 67–73.
- Kholifah, Siti Romadhotul, Zida Aunika, Siska Amellia Agustin, Sofiyah Azzahro Pribadi, and Sylvia Dwi Ifani. "Optimalisasi Kepengawasan Pendidikan Pesantren Dalam Manajemen Keuangan Lembaga Dan Santri Melalui Aplikasi Junio Smart." *Proceedings Series of Educational Studies* (2025).
- Kurniyawan, Hendi, and Achmad Fais Ghozali. "Strategi Inovasi Manajemen Mutu Untuk Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Digital." *Paradigma: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 108–115.
- Mania, Majidah Aqifah, Isra Yanuar Giu, and Ade Nurpriatna. "Evaluation of the Effectiveness of Management Information Systems in Improving Academic Performance and Management." *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 34–55.
- Mendrofa, Syah Abadi, Sartika Yuliana, Ahmad Mustanir, Diga Putri Oktaviane, Devi Anita, Lukman Hakim, Rikki Maulana Yusup, Alfiyah Agussalim, Dwi Nur Handayani, and Dian Rizke. *Good Governance Melalui Publik Digital*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Nurkartika, Novia. "E-Government Transformasi Menuju Good Goovernance." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–10.
- Pristiyanto, S S, and M P MM. "Administrasi Elektronik Dalam Pendidikan." *Pengantar Administrasi Elektronik* 98 (2024).
- Putra, Jamiluddin A M, Dewi Permata, Anjelina I P Djani, Debora L Sabetu, Yunita N Finit, and Fadil Mas'ud. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239–1251.
- Ramadhan, Gildan Jaya Muhammad. "Optimalisasi Jaringan Dan Infrastruktur Ti Untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar Di Sekolah." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 1 (2024): 1–6.
- Sabila, Syifa Nurul, and Wira Atman. "Studi Kasus Kebocoran Data SIM Card Oleh Bjorka: Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Keamanan Digital

- Di Indonesia." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 142–154.
- Sari, Rika Yohana, Ahmad Subandi, and Irsyad Irsyad. "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 4, no. 1 (2024): 21–29.
- Selvia, Noor Liyana. "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim." *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792–808.
- Setiawan, Andi, and Maya Lestari. "Digital Learning Leadership: Tantangan Dan Strategi Kepala Sekolah Di Masa Kini." *Jurnal Dinamika Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2025): 24–34.
- Shobri, Muwafiqus. "Peran Kepala Madrasah Sebagai Leader Visioner: Strategi Penguatan Mutu Dan Integritas Lembaga Pendidikan Islam." *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 191–210.
- Solehudin, Rd Heri. "Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Karakter Religius Menuju Transformasi Sosial Berkemajuan." *Inovasi Pendidikan dalam Multi Perspektif* 182 (2022).
- Suryana, Yaya, and Sofhian Fazrin Nasrulloh. "Rancang Bangun Sistem Infromasi Akademik Di Sma 2 Kuningan Berbasis Website." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 5 (2024): 10212–10222.
- Wirawan, Andhika, Fadiyah Putri Kusmana, Febriana Putri Nabilah, and Hesti Kusumaningrum. "Adaptasi Sekolah Terhadap Perubahan Lingkungan Eksternal: Strategi Dan Implementasi." *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 4 (2024): 189–206.
- Wulandjani, Harimurti, Bambang Widiyahseno, Eko Narto Utomo, Tekni Megaster, Eko Sudarmanto, Dwi Saleha, Ria Puspitasari, Eko Purwanto, Isa Amsyari, and Nur Islam. *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia, 2025.
- Yusuf Amrozi, S T, and M MT. *E-Government Di Era Artificial Intelligence*. Prenada Media, 2024.